

## **Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money**

**Dian Mawardi**

Universitas Islam Kadiri

**Kukuh Harianto**

Universitas Islam Kadiri

**Mawar Ratih Kusumawardani**

Universitas Islam Kadiri

*Korespondensi penulis: [graddy80@gmail.com](mailto:graddy80@gmail.com)*

**Abstract.** *The purpose of this research determines the implementation of the activity budget at Bappeda of Kediri Regency based on value for money analysis in the 2017 to 2021 fiscal year period. This research uses a qualitative descriptive, which refers to the observation of the budget for the activities of Bappeda Kediri Regency through the implementation of value for money measurement using the 3E ratio, namely effectiveness, efficiency and economy. Measurement of effectiveness is intended to determine whether the organization has achieved the goals set, has achieved it means that the organization has been running. Efficiency measurement is done by comparing expenditures with their expenditure standards, while economic is whether the local government in the use of its expenditure is able to carry out the targets it has set. The results of this research state that the realization of the ratio of effectiveness, efficiency and economy on the performance and budget of activities in the 2017-2021 fiscal year period of the Kediri Regency Development Planning Agency is in accordance with the criteria for value for money.*

**Keywords:** *Economical, Effectiveness, Efficiency, Value for Money,.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran kegiatan pada Bappeda Kabupaten Kediri berdasarkan analisis value for money pada periode tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang merujuk pada observasi realisasi anggaran kegiatan melalui implementasi pengukuran value for money dengan menggunakan rasio 3E, yaitu efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Pengukuran efektifitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah organisasi tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan, jika sudah mencapainya berarti organisasi tersebut sudah berjalan efektif. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya, sedangkan ekonomis adalah apakah pemerintah daerah dalam penggunaan belanjanya mampu melaksanakan target yang telah ditetapkannya. Hasil penelitian ini menyatakan rasio efektivitas, efisiensi dan ekonomis pada realisasi kinerja dan anggaran kegiatan pada periode tahun anggaran 2017-2021 Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kediri sudah sesuai kriteria value for money.

**Kata kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, *Value for Money*.

## **LATAR BELAKANG**

Permasalahan pengelolaan keuangan Instansi Pemerintah banyak dijadikan sorotan oleh masyarakat. Banyak masyarakat menganggap bahwa penghambur-hamburan uang rakyat sering dilakukan oleh Instansi Pemerintah untuk hal yang tidak penting, serta menyalahgunakan uang rakyat yang dikelolanya. Di era keterbukaan informasi dewasa ini, organisasi sektor publik dituntut oleh masyarakat untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik.

Pemerintah Daerah diharapkan bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya ditengah masa otonomi daerah ini, baik itu pembangunan fisik seperti seperti jalan dan jembatan yang membuat interkoneksi antar wilayah menjadi baik, rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan yang menjangkau ke seluruh wilayah sehingga mudah diakses oleh masyarakatnya, pembangunan sekolah untuk pembangunan sumber daya manusianya, serta pembangunan non fisik lainnya untuk peningkatan kualitas hidup penduduknya, yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri sudah tertuang dalam otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah kewenangan untuk mengelola pemeritahaan diserahkan kepada daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan di daerah yang lebih tahu adalah yang didaerah, bukan Pemerintah Pusat, oleh karena itu Pemerintah Daerah bisa membuat keputusan yang tepat akan kebutuhan, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi di daerahnya sendiri. Dengan adanya desentralisasi kewenangan kepada daerah untuk memperbaharui aturan dalam pengelolaan keuangannya.

Pemerintah Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan di bawah Pemerintah Pusat dimulai dari provinsi, masing-masing provinsi terbagi lagi menjadi kabupaten atau kota, dan masing-masing wilayah tersebut mempunyai pemimpin yaitu seorang Gubernur, Bupati maupun Walikota yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas sebagai perencana, penetapan, penyelenggara dan koordinator, pengevaluasi dan penanggungjawab kebijakan teknis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyusun anggaran keuangannya, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun setiap 25 tahun sekali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun setiap 5 tahun sekali, yang nantinya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahunan.

Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan keuangan daerah, yang kesemuanya itu bertujuan dalam menuju pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih dari korupsi (clean governance).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas untuk merumuskan, menyusun, melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu Bappeda mempunyai kewajiban melaporkan kinerjanya secara akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan sumberdaya yang dimiliki yang tujuannya telah ditetapkan secara periodik.

Untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri digunakan pengukuran dengan menggunakan metode “value for money” dengan menggunakan indikator-indikator tertentu. Dari indikator tersebut dapat kita lihat apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money”.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kinerja keuangan merupakan penggambaran keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran angka dalam satuan uang, yaitu dengan cara

membandingkan realisasi anggaran keuangan berdasarkan program dan kegiatannya. Penilaian kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

1. Efektivitas, rasio ini disebut efektif jika program kegiatan yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang direncanakan. Untuk menghitung rasio efektifitas ini yaitu dengan cara membandingkan *outcome* dengan input.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100 \%$$

Keterangan :

*Outcome* : Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

*Output* : Target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Menurut Mardiasmo (2018):

Nilai Rasio efektifitas	Keterangan
< 100%	Tidak efektif
= 100%	Efektif berimbang
>100%	efektif

2. Efisiensi, perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan hasil output dengan penggunaan input yang dilakukan (*cost of output*). Program kegiatan APBD disebut efisien jika output yang dihasilkan bisa maksimal dengan menggunakan input (sumber daya) yang minimal.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100 \%$$

Keterangan :

*Input* : Persentase realisasi anggaran kegiatan

*Output* : Persentase capaian keluaran kegiatan

Menurut kriteria *Gabriella et all* (2019:356):

Nilai Rasio <i>Efisiensi</i>	Keterangan
< 100%	Tidak efisien

= 100%	Efisien berimbang
>100%	Efisien

3. Ekonomis, merupakan perbandingan antara input dan nilai input, dengan kata lain ekonomis adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (spendingless).

$$Ekonomis = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran kegiatan

Nilai Input : Jumlah anggaran kegiatan

Menurut kriteria Purwiyanti (2019:194):

Nilai Rasio Ekonomis	Keterangan
< 100%	ekonomis
= 100%	ekonomis berimbang
>100%	Tidak ekonomis

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ruang lingkup penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Kediri untuk laporan keuangan periode 2017 sampai dengan 2021.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016:86), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri, sedangkan sampel yang diambil adalah laporan keuangan periode 2017-2021 atau 1 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program kegiatan oleh Bupati terpilih pada periode tersebut.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel yang diambil berasal dari laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri yang penulis analisa adalah seluruh program dan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai sampel yang akan ditentukan.

### **Penentuan Jumlah Sampel**

Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti mengambil sampel laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri periode 2017 sampai dengan 2021, hal ini dimaksudkan bahwa periode ini adalah 1 periode jabatan seorang Bupati atau 1 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengambilan 1 periode RPJMD dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan capaian suatu kebijakan oleh Bupati terpilih.

### **Data dan Teknik Pengumpulannya**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mempelajari dokumen yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri, selain itu dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu tentang “*value of money*”.

### **Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menerapkan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja dengan cara menganalisis indikator *value for money* yaitu dengan cara menghitung nilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas

dari realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran *value for money* dihitung berdasarkan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

### 1. Rasio Efektifitas



**Gambar 1. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas**

Hasil perhitungan di atas, indikator rasio efektifitas pada tahun 2017 pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sudah masuk dalam kategori efektif berimbang, hal ini disebabkan karena seluruh *output* dan *outcome* pada kegiatan Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Kediri bernilai 100%.

Pada tahun 2018 indikator rasio efektifitas pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efektif berimbang karena hampir seluruh *output* dan *outcome* pada kegiatan Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Kediri bernilai 100%, dan hanya 1 kegiatan saja yang tidak efektif yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) yang menghasilkan rasio 0%, hal ini disebabkan karena belum ada petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis (JUKLAK/JUKNIS) tentang kegiatan ini dari Pemerintah Pusat, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.

Pada tahun 2019 indikator rasio efektifitas pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efektif berimbang karena seluruh *output* dan *outcome* pada kegiatan Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Kediri bernilai 100%.

Pada tahun 2020 indikator rasio efektifitas pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efektif berimbang karena seluruh *output* dan *outcome* pada kegiatan Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Kediri bernilai 100%.

Pada tahun 2021 indikator rasio efektifitas pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efektif berimbang karena seluruh *output* dan *outcome* pada kegiatan Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Kediri bernilai 100%.

## 2. Rasio Efisiensi



Gambar 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Pada tahun 2017 indikator rasio efisiensi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori efisien, karena hasil perhitungannya nilainya lebih besar dari 100%, dan ada 19 kegiatan yang masuk kategori efisien berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio efisiensinya sama dengan 100%.

Pada tahun 2018 indikator rasio efisiensi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efisien karena hampir seluruh perhitungannya bernilai lebih dari 100% ada 3 kegiatan yang masuk kategori efisien berimbang, dan hanya 1 kegiatan saja yang tidak efisien yaitu kegiatan “Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)” yang menghasilkan rasio 0%, hal ini disebabkan karena belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (JUKLAK/JUKNIS) tentang kegiatan ini dari Pemerintah Pusat, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.

Pada tahun 2019 indikator rasio efisiensi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori efisien, karena hasil perhitungannya nilainya lebih besar dari 100%, dan ada 4 kegiatan yang masuk kategori efisien berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio efisiensinya sama dengan 100%.

Pada tahun 2020 indikator rasio efisiensi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori efisien, karena hasil perhitungannya nilainya lebih besar dari 100%, dan ada 3 kegiatan yang masuk kategori efisien berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio efisiensinya sama dengan 100%.

Pada tahun 2021 indikator rasio efisiensi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori efisien, karena hasil perhitungannya nilainya lebih besar dari 100%, dan ada 14 kegiatan yang masuk kategori efisien berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio efisiensinya sama dengan 100%.

### **3. Rasio Ekonomis**



**Gambar 3. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomis**

Pada tahun 2017 indikator rasio ekonomi pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri hampir semuanya masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil perhitungannya nilainya kurang dari 100%, rasio terkecil ada pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yaitu sebesar 16,78% dan ada 1 kegiatan yaitu “*Penyusunan Buku Saku Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan*” yang masuk kategori ekonomis berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio ekonomisnya sama dengan 100%.

Pada tahun 2018 indikator rasio ekonomis pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri juga masuk dalam kategori efisien karena hampir seluruh perhitungannya bernilai kurang dari 100%. Namun walaupun ada yang menghasilkan nilai rasio 0% pada kegiatan “*Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)*” menurut kategori juga dimasukkan ke dalam kategori ekonomis. Kegiatan ini memperoleh rasio 0% disebabkan karena belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (JUKLAK/JUKNIS) tentang kegiatan ini dari Pemerintah Pusat, sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.

Pada tahun 2019 indikator rasio ekonomis pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri semuanya masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil perhitungannya nilainya kurang dari 100%, dengan rasio terendah adalah kegiatan “*Pelaksanaan Musrenbang*” dengan capaian rasio 55,53%.

Pada tahun 2020 indikator rasio ekonomis pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil perhitungannya nilainya kurang dari 100%, dan ada 1 kegiatan yang masuk kategori ekonomis berimbang yaitu kegiatan “*Sistem Data dan Informasi Pembangunan Daerah*” yang nilai rasionya mencapai 100%. Capaian rasio terendah ada pada kegiatan “*Fasilitasi Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3)*” yaitu sebesar 80,55%.

Pada tahun 2021 indikator rasio ekonomis pada kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar masuk dalam kategori ekonomis, karena hasil perhitungannya nilainya kurang dari 100%, dan ada 3 kegiatan yang masuk kategori ekonomis berimbang, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan rasio ekonomisnya sama dengan 100%, dengan capaian rasio ekonomis terendah pada kegiatan “*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*” dengan rasio 62,07%.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai rasio keuangan pada APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri periode tahun 2017-2021 sudah efektif, efisien dan ekonomis dan sudah memenuhi unsur *value for money*.

### **Saran**

1. Indikator output dan outcome yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri sebagian besar sudah berhasil (mencapai 100%) setiap tahun dalam pelaksanaan kegiatannya, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa kualitas kinerjanya sudah baik, tetapi bisa juga indikator kinerja yang sudah ditetapkan terlalu umum sehingga sangat mudah dicapai, kedepannya diharapkan bagian perencanaan program dan kegiatan (SUNGRAM) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri lebih detail dan spesifik dalam membuat

indikator kinerja sehingga kualitas dari indikatornya mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Perlunya dibuat analisis standar biaya dalam penganggaran kegiatan, agar uang yang dialokasikan pada kegiatan bisa mencerminkan kebutuhan dari pembiayaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terserap dan menjadi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Perencanaan Keuangan Daerah Kabupaten Kediri pada khususnya maupun kinerja APBD Kabupaten Kediri pada umumnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alimudin, F. & Damis, Y. (2018). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang.
- Hanifah, H. N., Widiyanti, H., & Mahmudah, N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Slawi.
- Purwiyanti, D. (2017) "Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)," Jurnal Katalogis, Vol. 5 (No. 3).
- Rosidah, N. (2017). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Suriatman, M. & Syamsul (2021). Efektivitas dan Efisiensi Belanja di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.